

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. Koefisien positif menunjukkan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang mengalami peningkatan akan memberikan efek yang baik dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,890. Nilai ini berarti bahwa sebesar 89,00% pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo dijelaskan oleh pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sementara itu sebesar 11,00% menjadi variabilitas variabel lain terhadap pendapatan asli daerah (PAD) seperti variabel jenis lainnya dari pajak daerah tingkat Kabupaten, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah, produk domestik regional bruto (PDRB) serta belanja pembangunan sarana dan prasarana daerah.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo menetapkan dan mengupdate tarif pajak dan nilai NJOP yang lebih tinggi terutama bagi daerah dengan tingkat keramaian atau adanya akses

pentng untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pada daerah yang ramai sehingga pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB P2) akan semakin tinggi. Kemudian dengan aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan serta motivasi bagi pegawai terutama bagian lapangan yang melakukan penagihan pajak.

2. Perlunya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah secara optimal dan berkelanjutan serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel demi terciptanya kredibilitas, keterbukaan dan keandalan sistem manajemen keuangan daerah serta melakukan koordinasi yang aktif baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan hal ini maka pemerintah Kabupaten Gorontalo akan semakin baik dalam LPPD dan LKPD.
3. Perlunya untuk mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan keuangan terutama dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat juga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan cara memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wajib pajak, perlunya sistem informasi perpajakan berbasis web/internet dan sejenisnya, serta perlunya pelayanan pajak keliling (Tax Mobile). Kemudian mengoptimalkan penerapan Sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, Pemberian Sosialisasi, Papan Informasi, Brosur, Banner, Baliho untuk meningkatkan Pengetahuan, kesadaran dan ketaatan wajib pajak, dan Sarana dan Prasarana perpajakan daerah yang memadai untuk Akses dan Kemudahan dalam perpajakan daerah khususnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian ini dengan melakukan inovasi pada model dan metode penelitian dimana alangkah baiknya peneliti selanjutnya membandingkan sejauh mana efektivitas dari pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo sebelum dan sesudah adanya peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Samsul. 2016. Analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran di Kota Palopo. *Tesis*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Ardhini dan Sri Handayani. 2011. “Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah)”. *Jurnal Akuntansi*.
- Argi, Ridho. 2011. “Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jateng Periode 2004-2009” *Skripsi*. Semarang: FE Universitas Diponegoro.
- Aulia Fitri Rahdania, Budi Ispriyarso, dan F.C. Susila Adiyanta. 2017. Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang. *Diponegoro Law Jurnal*
- Brotodihardjo, Santoso, 2014. Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung PT Refika Aditama.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ke-2. Jakarta: PT. Indeks.
- Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka
- Donovan, Deny dan Amanah, Lailatul. 2015. Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.4 No.11. Surabaya: Stiesia
- Gie, The Liang. 2014. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Modern Liberty.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Harinaldi. 2005. Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains, Jakarta: Erlangga.
- Harun, Hamrolie H. 2012. Menghitung Porenti Pajak Dan Retribusi Daerah. BPFY-Yogyakarta.
- Husain, Walidun. 2013. *The Influence Of Local Taxes and Levies Towards Expenditure Allocation in Kota Gorontalo Indonesia*. IJRRAS Volume 5 Issue 2.
- Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ladjin, Nurjanna,2008. Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah). *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2008. Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta:STIE YKPN.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mukhlis, Imam. 2010. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Malang : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
- Munawir, S. 2014. Analisis Laporan Keuangan. Yogyakarta : Liberty.
- Neni, Nurhayati, 2015, Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kab/Kota Cirebon III. Jurnal, Universitas Kuningan.
- Nirzawan. 2016. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN

- Nordiawan, Dedi dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan* , Jakarta : Salemba Empat.
- Rahman, Agus dkk. 2014. *Metode Penelitian Psikologi Langkah Cerdas. Menyelesaikan Skripsi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Renaningsih, M.S. 2015. Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya (Studi Deskriptif tentang Keefektifan Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setelah dialihkn dari Pajak Pusat menjadi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3 Nomor 3. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidik, Machmud. 2012. Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah melalui Penggalan Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah. *Orasi Ilmiah*. Tidak diterbitkan. Bandung: STIA LAN.
- Suparmi, Christiana.,dkk.2014. *Kursus Keuangan Daerah: Modul Penerimaan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2012. *Statistik Parametik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Scott, William R. 2012. *Financial Accounting Theory International Fifth Edition*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Setiawan, Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian* Jakarta: Medika.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunjoyo, dkk. 2013. *Aplikasi SPSS untuk Smart Riset*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, dkk, 20113. Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2013, Universitas Jambi
- Trisnawati, Ni Luh M. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan di Kota Denpasar. *Tesis*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Widodo., Widodo A dan Puspita, A.H. 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Wijaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib Pajak.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan No. 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.